



Strategi Transformasi Konflik Digital dalam Mengatasi Polarisasi Politik di Media Sosial

Digital Conflict Transformation Strategies to Address Political Polarization on Social Media

Dedi Iskandar^{1*}, Afrizal Tjoetra²

Universitas Teuku Umar

Email: dedi.iskandar.pasca@gmail.com¹, afrizaltjoetra@utu.ac.id²

Article Info

Article history:

Received : 15-06-2026

Revised : 17-06-2026

Accepted : 19-06-2026

Published : 21-06-2026

Abstract

Political polarization on social media has shifted from mere ideological differences to affective polarization based on intergroup hatred. Conventional approaches such as content moderation often fail to address the root cause and instead fuel censorship issues. This research employed a qualitative approach with library research and descriptive-analytical analysis. The results show that digital conflict transformation does not aim to eliminate political differences, but rather to shift the way these conflicts are expressed, shifting from personal hostility (toxic polarization) to healthy policy debate (agonistic pluralism). This strategy offers a new framework for policymakers and peace practitioners in maintaining an inclusive and democratic digital space

Keywords: *Digital Conflict Transformation, Political Polarization, Social Media*

Abstrak

Polarisasi politik di media sosial telah bergeser dari sekadar perbedaan ideologi menjadi polarisasi afektif yang berbasis kebencian antarkelompok. Pendekatan konvensional seperti moderasi konten sering kali tidak mampu menyelesaikan akar masalah dan justru memicu isu sensor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi konflik digital tidak bertujuan menghapus perbedaan politik, melainkan mengubah cara konflik tersebut diekspresikan dari bentuk permusuhan personal (toxic polarization) menjadi perdebatan kebijakan yang sehat (agonistic pluralism). Strategi ini menawarkan kerangka kerja baru bagi para pembuat kebijakan dan praktisi perdamaian dalam menjaga ruang digital yang inklusif dan demokratis.

Kata Kunci: *Transformasi Konflik Digital, Polarisasi Politik, Media Sosial*

PENDAHULUAN

Media sosial kini menjadi arena utama pembentukan opini publik sekaligus episentrum polarisasi politik. Algoritma platform yang mengutamakan keterlibatan (*engagement*) tinggi cenderung mengamplifikasi konten ekstrim, menciptakan ruang gema (*echo chambers*), dan memperuncing segregasi sosial. Upaya mengatasi masalah ini umumnya bertumpu pada manajemen konflik tradisional, seperti penghapusan konten (*take-down*) atau pemblokiran akun. Namun, metode ini sering kali gagal karena hanya meredam gejala sementara (simtomatik) tanpa menyentuh akar penyebab permusuhan.

Ekosistem digital, khususnya media sosial, telah bertransformasi dari ruang kebebasan berekspresi menjadi medan pertempuran ideologis yang sengit. Di berbagai belahan dunia, platform



seperti X (dahulu Twitter), Meta (Facebook dan Instagram), serta TikTok menjadi katalis utama bagi menguatnya polarisasi politik.

Fenomena ini tidak lagi sekadar mencerminkan perbedaan pilihan kebijakan atau platform partai (issue-based polarization), melainkan telah bergeser ke arah polarisasi afektif (affective polarization). Dalam kondisi ini, jarak sosial antarkelompok masyarakat semakin melebar, di mana lawan politik tidak lagi dipandang sebagai kompetitor yang sah dalam demokrasi, melainkan sebagai musuh eksistensial yang harus didelegitimasi.

Akar dari eskalasi konflik digital ini terletak pada arsitektur teknis media sosial itu sendiri. Demi mengejar keuntungan ekonomi di era attention economy, platform merancang algoritma rekomendasi yang memprioritaskan keterlibatan (engagement) pengguna. Konten yang memicu emosi kuat seperti kemarahan, ketakutan, dan kebencian terbukti secara empiris mendapatkan traksi dan penyebaran paling cepat. Akibatnya, terbentuklah ruang gema (echo chambers) dan gelembung filter (filter bubbles) yang mengisolasi individu dari pandangan alternatif, memperkuat bias konfirmasi, dan secara sistematis mengikis empati sosial.

Hingga saat ini, pendekatan yang umum digunakan oleh penyelenggara platform maupun regulator dalam mengatasi polarisasi digital bersifat kuratif-represif. Manajemen konflik konvensional ini bertumpu pada moderasi konten, seperti penghapusan unggahan (take-down), pelabelan hoaks, hingga pemblokiran akun (deplatforming). Kendati taktik ini mampu meredam penyebaran konten toksik secara instan, pendekatan ini memiliki keterbatasan mendasar. Pertama, tindakan intervensi sepihak ini sering kali memicu perdebatan baru terkait sensor digital dan pelanggaran kebebasan berpendapat. Kedua, dan yang paling krusial, manajemen konflik tradisional hanya menyembuhkan gejala permukaan (simtomatik) tanpa pernah menyentuh akar penyebab struktural dan relasional dari permusuhan digital tersebut.

Melihat keterbatasan tersebut, penelitian ini menawarkan paradigma alternatif berupa Transformasi Konflik Digital (Digital Conflict Transformation). Berakar dari teori sosiologi konflik John Paul Lederach, transformasi konflik melihat konflik bukan sebagai anomali destruktif yang harus segera dihapus atau dihentikan, melainkan sebagai dinamika sosial yang tak terhindarkan dan membawa energi perubahan.

Dalam konteks ruang siber, strategi ini tidak fokus pada bagaimana "menghentikan perdebatan", melainkan bagaimana mengubah (transform) struktur komunikasi, pola relasi antar-pengguna, dan narasi yang melatarbelakanginya dari bentuk yang toksik-destruktif menjadi dialogis-konstruktif. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi antara teori resolusi konflik sosial klasik dengan dynamic arsitektur teknologi siber terkini, termasuk pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dan konsep bridging algorithms.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menguraikan strategi komprehensif dalam mengimplementasikan Transformasi Konflik Digital guna mengatasi polarisasi politik di media sosial. Secara spesifik, penelitian ini akan menganalisis tiga pilar strategi utama, yaitu redesign arsitektur platform berbasis deliberasi, intervensi narasi tandingan bertenaga AI, dan penguatan literasi digital transformatif. Melalui perumusan strategi ini, diharapkan ruang digital dapat dikembalikan fungsinya sebagai ruang publik yang sehat, inklusif, dan mendukung keberlanjutan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang disebut Transformasi



Konflik Digital. Pendekatan ini melihat konflik bukan sebagai anomali yang harus dihapus, melainkan sebagai energi sosial yang dapat diarahkan menuju perubahan struktural dan relasional yang lebih demokratis di dunia maya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berpusat pada pengembangan konseptual dan formulasi strategi teoritis-praktis mengenai transformasi konflik di ruang siber, yang memerlukan sintesis mendalam dari berbagai literatur lintas disiplin (sosiologi konflik, ilmu komunikasi, dan teknik informatika/sains data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Konflik sebagai Pendekatan Komprehensif Menuju Perdamaian Berkelanjutan

Konflik merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, yang tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Dalam konteks interaksi sosial, terdapat tiga fase penting dalam perubahan konflik menuju integrasi sosial: konflik internal masyarakat, resolusi konflik yang bersifat sementara, dan transformasi konflik sebagai bentuk paling damai dari sistem sosial. Transformasi konflik merupakan pendekatan komprehensif yang tidak sekadar menyelesaikan permasalahan secara superficial, melainkan mengubah secara mendasar struktur dan sistem sosial yang ada. Menurut John Paul Lederach, seorang ahli resolusi konflik terkemuka, transformasi konflik melibatkan perubahan pada empat dimensi utama: personal, relasional, kultural, dan struktural.

Dimensi personal dalam transformasi konflik fokus pada perubahan individu-individu yang terlibat dalam konflik. Hal ini mencakup pengembangan kesadaran, empati, dan kemampuan untuk memahami perspektif pihak lain. Perubahan pada level individual ini menjadi landasan awal bagi upaya perdamaian yang lebih luas. Transformasi relasional bermakna pada pembangunan kembali hubungan antarkelompok atau individu yang sebelumnya terputus atau teralienasi akibat konflik. Proses ini membutuhkan komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan membangun kepercayaan kembali melalui dialog konstruktif.

Dimensi kultural dalam transformasi konflik merujuk pada perubahan fundamental dalam budaya masyarakat dari yang konfliktual menuju sistem yang lebih integratif. Hal ini melibatkan rekonstruksi nilai-nilai, norma sosial, dan kebiasaan yang sebelumnya mendukung terjadinya konflik. Transformasi struktural berfokus pada perubahan sistem dan kelembagaan yang menjadi akar permasalahan konflik. Ini termasuk reformasi kebijakan, sistem pemerintahan, mekanisme distribusi sumber daya, dan struktur kekuasaan yang tidak adil.

Dalam konteks konflik etnis yang kompleks dan sistemik, transformasi konflik dipandang sebagai metode pembangunan perdamaian tanpa kekerasan. Pendekatan ini bertujuan mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dan memulihkan hubungan sosial yang terputus. Transformasi konflik tidak melihat konflik sebagai sesuatu yang inherently buruk, melainkan sebagai potensi perubahan sosial. Tujuannya adalah mengubah dinamika konflik secara bertahap untuk menghindari kekerasan dan menciptakan perdamaian positif yang berkelanjutan.



Menurut Johan Galtung, transformasi konflik bukan sekadar menghentikan kekerasan fisik, tetapi juga menyelesaikan kekerasan struktural yang tersembunyi dalam sistem sosial. Ini berarti membangun struktur yang adil, inklusif, dan memberdayakan semua pihak. Proses transformasi konflik membutuhkan koordinasi dan keterlibatan multipihak. Lederach menekankan pentingnya membangun hubungan dan koordinasi antarsektor masyarakat, menciptakan pemahaman lintas kelompok, dan memformalisasi upaya perdamaian.

Penelitian Susetyo, Ikram, dan Damayantie (2022), menunjukkan bahwa transformasi konflik dapat membawa wilayah dan kelompok menuju demokrasi, pembangunan, dan perdamaian. Namun, hal ini memerlukan implementasi yang hati-hati, pemantauan sistematis, dan komitmen jangka panjang. Pendekatan transformasi konflik berbeda dengan resolusi konflik konvensional yang cenderung bersifat jangka pendek. Transformasi konflik adalah proses berkelanjutan yang dapat memakan waktu puluhan tahun, tidak dapat diharapkan menghasilkan perubahan instan.

Keberhasilan transformasi konflik sangat tergantung pada kemampuan para pihak untuk melepaskan dendam, membangun empati, dan fokus pada masa depan yang lebih baik. Ini membutuhkan keterbukaan, kesediaan untuk mendengar, dan komitmen bersama. Peran pemimpin dan tokoh masyarakat sangat kritis dalam proses transformasi konflik. Mereka harus mampu menjembatani perbedaan, mendorong dialog konstruktif, dan menunjukkan teladan dalam membangun perdamaian.

Transformasi konflik juga memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya dan sejarah lokal. Setiap wilayah memiliki dinamika konflik unik yang membutuhkan strategi khusus dan pendekatan yang disesuaikan. Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam transformasi konflik. Masyarakat tidak boleh sekadar menjadi objek, tetapi harus aktif terlibat dalam merancang dan mengimplementasikan inisiatif perdamaian.

Aspek psikologis dan emosional sangat penting dalam transformasi konflik. Proses penyembuhan trauma, rekonsiliasi, dan membangun kembali kepercayaan membutuhkan pendekatan holistik yang menghargai pengalaman setiap individu. Mekanisme keadilan transisional, seperti pengadilan HAM, komisi kebenaran, dan program rehabilitasi, dapat menjadi instrumen penting dalam transformasi konflik. Namun, harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak memicu konflik baru.

Pendidikan perdamaian dan kesadaran publik merupakan strategi fundamental dalam transformasi konflik jangka panjang. Ini meliputi pengembangan kurikulum, program pertukaran, dan inisiatif lintas kelompok untuk membangun saling pengertian.

Peningkatan Literasi Digital Kritis

Literasi digital kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami informasi secara mendalam di ruang digital. Hal ini membekali Anda agar tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi mampu menyaring hoaks, mengenali bias konten, serta memahami tujuan di balik sebuah pesan daring. Peningkatan literasi digital kritis adalah proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menyaring informasi digital secara mendalam sebelum memercayai atau menyebarkannya. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya bisa mengoperasikan gawai (cakap digital), tetapi juga mampu berpikir skeptis dan logis terhadap segala konten di ruang siber.



Platform digital dirancang untuk menahan perhatian pengguna selama mungkin demi keuntungan iklan. Hal ini memicu penyebaran konten sensasional yang mengabaikan akurasi. Secara psikologis, manusia cenderung langsung memercayai informasi yang mendukung pandangan politik atau keyakinan pribadinya, sekalipun informasi tersebut palsu. Generasi tua (*digital immigrants*) sering kali lebih rentan terhadap hoaks berbasis teks (seperti di WhatsApp), sementara generasi muda (*digital natives*) lebih rentan terhadap manipulasi visual (*deepfake* atau *reels*).

Literasi kritis tidak boleh berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran. Keterampilan ini harus disisipkan dalam pelajaran bahasa (analisis teks), sejarah (*kritik sumber*), hingga sains (metode ilmiah). Guru harus beralih fungsi dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator debat, diskusi, dan pemecahan masalah berbasis kasus digital. Sementara itu, orang tua perlu membangun dialog terbuka di rumah mengenai apa yang anak-anak mereka tonton dan konsumsi di media sosial, bukan sekadar membatasi waktu layar (*screen time*). Rendahnya literasi digital kritis mempermudah aktor jahat menyebarkan kampanye hitam (*black campaign*) dan propaganda saat pemilu yang dapat memecah belah bangsa. Negara dengan tingkat literasi kritis yang rendah menjadi target empuk bagi operasi pengaruh asing (*foreign influence operations*) yang bertujuan mengacaukan stabilitas nasional. Ketika masyarakat tidak lagi mampu membedakan fakta dan fiksi, kepercayaan terhadap institusi resmi seperti sains, jurnalisme, dan pemerintah akan runtuh.

Penguatan Regulasi dan Etika Digital

Penguatan regulasi dan etika digital sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan teknologi seperti hoaks, perundungan siber (*Cyberbullying*), dan pencurian data. Di Indonesia, kerangka hukum seperti Undang-undang (UU) ITE menjadi landasan penindakan, sementara literasi digital menjadi fondasi kesadaran moral masyarakat. Etika digital adalah seperangkat aturan dan nilai moral yang memastikan penggunaan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan menghormati pengguna lain.

Untuk membangun ekosistem digital yang sehat, Kementerian Komdigi menekankan konsep Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Hal ini diwujudkan melalui 4 Pilar Literasi Digital: Kecakapan Digital (*Digital Skills*) yaitu kemampuan menggunakan perangkat keras dan lunak dengan efektif. Keamanan Digital (*Digital Safety*) adalah pemahaman menjaga gawai dan data dari peretasan atau malware. Budaya Digital (*Digital Culture*) merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kemudian etika digital (*Digital Ethics*) adalah perilaku positif dan beradab di dunia maya.

Penguatan regulasi dan etika digital harus diwujudkan dalam langkah taktis dan kolaborasi konkret antara pemerintah, platform penyedia layanan, serta masyarakat. Tanpa tindakan nyata, regulasi hanya akan menjadi dokumen hukum pasif dan etika hanya menjadi slogan. Penegakan hukum dan pengawasan regulasi yang kuat memerlukan mekanisme penegakan yang konsisten dan adaptif guna memastikan platform digital besar transparan dalam menggunakan algoritma mereka agar tidak menyebarkan disinformasi demi mengejar engagement. Selain itu, diberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran data dengan menerapkan denda administratif yang berat bagi korporasi atau lembaga yang gagal melindungi data pribadi pengguna. Kemudian membentuk Satgas Keamanan Siber yang bertujuan untuk memperkuat tim respons insiden siber untuk mendeteksi dan menindak cepat sindikat judi online, penipuan digital, dan peretasan.



Teori Transformasi Konflik

Teori Transformasi Konflik adalah pendekatan dalam resolusi konflik yang memandang konflik bukan sekadar masalah yang harus diselesaikan, melainkan sebagai peluang untuk perubahan sosial yang positif. Merujuk pada pemikiran John Paul Lederach, transformasi konflik berfokus pada pembangunan perdamaian jangka panjang. Proses ini tidak hanya menyelesaikan sengketa sesaat (resolusi), tetapi mengubah struktur, hubungan, dan budaya yang menghasilkan konflik tersebut. Dalam konteks digital, hal ini berarti mengubah infrastruktur digital dan pola komunikasi pengguna. Teori ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya fokus menghentikan kekerasan secara instan (penyelesaian konflik), transformasi konflik berfokus pada akar penyebab masalah dan membangun kembali hubungan yang rusak dalam jangka panjang.

Kesimpulan dari Teori Transformasi Konflik adalah bahwa konflik merupakan bagian alami dan permanen dari dinamika manusia yang tidak harus dimusnahkan, melainkan diubah menjadi energi positif untuk mendorong perubahan sosial yang adil. Secara ringkas, esensi dari kesimpulan teori ini dapat dibagi menjadi empat poin utama. Teori ini menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak tercapai hanya dengan menghentikan kekerasan fisik atau menandatangani perjanjian damai, melainkan dengan menyelesaikan akar penyebab konflik. Keberhasilan transformasi diukur dari sejauh mana hubungan antar-pihak yang bertikai dapat dipulihkan, serta seberapa jauh sistem sosial, politik, dan ekonomi yang tidak adil diubah menjadi lebih inklusif.

Konflik dipandang sebagai proses yang terus berjalan (*ongoing process*). Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan sekadar solusi instan (*quick fix*). Perdamaian yang kokoh tidak bisa hanya mengandalkan diplomasi elite politik (*top-down*), tetapi harus melibatkan tokoh masyarakat tingkat menengah serta membangun kesadaran di tingkat akar rumput (*bottom-up*).

KESIMPULAN

Polarisasi politik di media sosial dipicu oleh algoritma yang menciptakan ruang gema (*echo chamber*) dan memicu konflik horizontal. Strategi transformasi konflik digital tidak lagi bisa mengandalkan penghapusan konten semata, melainkan harus beralih pada pendekatan holistik. Transformasi ini berhasil dicapai melalui penguatan literasi digital kritis masyarakat, penerapan moderasi konten berbasis kecerdasan buatan (AI) yang netral, serta penciptaan ruang dialog digital yang inklusif. Melalui sinergi antara pemerintah, platform media sosial, dan warga digital, konflik destruktif di dunia maya dapat diubah menjadi kontestasi ide yang konstruktif bagi demokrasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengatasi polarisasi politik digital memerlukan pergeseran paradigma dari sekadar resolusi konflik (meredam gejala) menuju transformasi konflik (mengubah akar masalah). Media sosial yang awalnya menjadi ruang pembelahan harus direkonstruksi menjadi sarana komunikasi empati. Strategi transformasi konflik digital yang efektif melibatkan pembangunan narasi tandingan (*counter-narratives*) yang humanis, fasilitasi mediator digital pihak ketiga, dan restrukturisasi interaksi antarkelompok yang bertikai guna membangun kembali modal sosial yang retak akibat komodifikasi politik identitas.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A., Fauzi, A., & Harizal, G. (2025). *Politik Identitas dalam Era Digital dan Implikasinya terhadap Stabilitas Sosial dan Integrasi Nasional*. Jurnal Inen Paer, 3(1), 120-135.



- Akbar, M., & Fauzi, M. (2026). *Social media, fragmentation, and polarization in the platformized public sphere: Making the case for hybrid digital dialogue*. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 16(1), 1814-1829.
- Anshori, M. U. (2020). *Transformasi konflik di era digital: Peluang dan tantangan perdamaian siber*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 45-58.
- Arisya, N. N. N., & Nazman, B. N. (2026). *Social Media as a Negative Source of Political News in a Polarized Society: Cross-Country Comparative Perception*. *Journal of Digital Sociology and Political Culture*, 7(2), 210-225
- Arsyad, D., Nurmiarani, M., & Rantona, S. (2024). *Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik: Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik*. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 240–251.
- Bail, C. A., Settle, J. E., & Stray, J. (2025). *Towards a third side on social media: Technical affordances and conflict escalation dynamics*. *Journal of Peace and Digital Conflict*, 4(2), 258-272.
- Bilewicz, M., & Sorel, O. (2025). *Ideology and polarization set the agenda on social media: From online hostility to real-world social friction*. *Nature Human Behaviour*, 9(11), 1432-1445.
- Bora, A., Ghai, R., & Gupta, P. (2023). *Social Media Engendered Polarization During Geopolitical and Political Conflict: Algorithmic Architecture and Narratives*. *Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences*, 56, 1240-1249.
- Daniel, M. (2024). *Impact of Social Media Usage on Political Polarization: Structural Transparency and Digital Literacy Remedies*. *International Journal of Digital Communication*, 8(3), 114-128.
- Efrianti, Y. (2025). *Polarisasi Politik Indonesia Tahun 2024 dalam Pemberitaan Media Online*. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 3(1), 74-91.
- Fasta, F., & Ayuningtyas, F. (2025). *Media Sosial dan Demokrasi Digital: Strategi Kurasi Opini Publik Inklusif Pasca-Pemilu*. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 14(2), 180-195.
- Juditha, C. (2019). *Fenomena pemilu serentak 2019: Polarisasi politik di media sosial*. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 105-122.
- Kubin, E., & von Sikorski, C. (2024). *Social Media Use and Political Engagement in Polarized Times: Examining the Contextual Roles of Issue and Affective Polarization*. *Social Media + Society*, 10(1), 1-15.
- Kurniawati, D., dkk. (2025). *Kontribusi Keilmuan Komunikasi dalam Transformasi Sosial & Digital di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Galuh Patria.
- Lee, S., & Kim, J. (2024). *Social Media and Perceived Political Polarization: Role of Perceived Platform Affordances, Participation in Uncivil Political Discussion, and Media Literacy*. *American Journal of Communication*, 6(1), 56-66.
- Lestari, P., & Mutmainah, S. (2021). *Strategi komunikasi digital dalam mereduksi konflik politik pasca-pemilu di media sosial*. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2), 340-355.
- Mazliana, A., Nazarlin, Putri, S. A., Fijriah, R., & Oktal, A. (2026). *Politik Identitas dan Polarisasi Sosial: Dinamika dalam Demokrasi dengan Tinjauan Sistematis Literatur Review*. *JISoH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 1156-1169
- Naharuddin. (2026). *Influence of Social Media Political Polarization on Urban Community Social Stability*. *Journal of Urban & Democratic Governance*, 6(2), 58-71.



- Noviana, V. L. (2026). *Dampak polarisasi media sosial terhadap partisipasi politik pemilih muda di Indonesia*. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(2), 702-709
- Nugraha, A., & Haruna, R. (2026). *Rekonstruksi Politik untuk Menganalisis Polarisasi dan Gangguan Demokrasi Digital di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISDIK)*, 5(2), 847-862.
- Oktavio, F., Permatasari, D., Salsabila, P., & Ulfah, K. (2026). *Systematic Literature Review: Krisis Politik dan Polarisasi Masyarakat di Media Sosial dalam Konteks Global South*. *Jurnal Media Akademik*, 4(1), 17032-17045.
- Porat, T., & Refaeli, M. (2024). *Political Polarization on the Digital Sphere: A Cross-platform, Over-time Analysis of De-polarization Strategies on Private Networks*. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 29(3), zmad012
- Prasetyo, A. B. (2022). *Literasi digital sebagai instrumen resolusi konflik dan penanganan polarisasi politik netizen*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 12-29.
- Purnomo, S., & Rosidi, I. (2025). *Digital Activism and Political Change: Challenges of Social Media Polarization and Systematic Disinformation*. *Journal of Middle East and Islamic Studies*, 11(2), 85-99.
- Putri, S. D. K., & Agustin, A. F. (2026). *Transformation of political campaigning in the digital era: The impact of social media and ethical digital communication*. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 8(1), 31-41
- Rhodes, S. C. (2025). *The Politics of Misinformation: Social Media, Algorithmic Engagement, and Political Polarization in 2025*. *Austrian Institute for International Politics (OIIIP) Policy Brief*, 12(1), 45-59.
- Siahaan, M., & Hutagalung, B. (2026). *Polarisasi Politik dalam Era Media Sosial: Kajian Bibliometrik serta Etika Komunikasi Politik Siyarah Syar'iyah*. *Jurnal Moralita*, 14(1), 102-115.
- Susetyo, S., Ikram, I., & Damayantie, A. (2022). *Pendekatan Sistemik Untuk Analisis Dan Transformasi Konflik: Studi Kasus Konflik Sosial Di Desa Balinuraga*. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(1), 108-125.
- Wahyudi, T., & Kirom, L. (2026). *Politik Digital: Manifestasi Komunikasi dan Konstruksi Konsensus di Era Digital*. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 29(1), 190-204.
- Zannone, N., & Cinelli, M. (2026). *Identifying Political Polarization in Social Media: A Systematic Review of Community Detection Techniques*. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 34(1), 80-89.